

Komnas HAM Selidiki Kasus Benjina

AMBON, KOMPAS — Tim dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Polri akan melakukan penyelidikan atas dugaan perbudakan dan sejumlah pelanggaran hukum lainnya oleh PT Pusaka Benjina Resources, perusahaan perikanan yang berpusat di Pulau Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual Mukhtar saat dihubungi *Kompas* dari Ambon, Jumat (10/4). Kedua tim tiba di sana pada Sabtu ini. "Mereka akan ke tempat kami untuk mengambil data yang diperlukan," ujar Mukhtar.

Seperi diberitakan Associated Press, ada anak buah kapal (ABK) asal Myanmar yang mengaku diperlakukan tidak manusiawi, antara lain dipaksa bekerja 20-22 jam per hari, dikurung, disiksa, dan tidak diberikan upah. Dugaan itu dibantah PT Pusaka Benjina Resources.

Selain itu, dari catatan *Kompas*, juga terjadi pungutan liar terhadap kapal milik PT Pusaka Benjina Resources dan sejumlah

kapal di sana. Pungutan liar itu melibatkan oknum pengawas perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Imigrasi, Karantina, syahbandar, Bea dan Cukai, Polri, serta TNI.

Setiap kapal yang mengajukan surat laik operasi (SLO) diwajibkan membayar Rp 250.000. Terdapat lebih dari 80 kapal yang berada di sana.

Tidak hanya SLO, oknum pengawas perikanan juga mewajibkan setiap kapal ekspor membayar Rp 5 juta. Setiap bulan, lebih dari empat kapal ekspor bertolak dari Benjina. Pungutan liar itu marak sebelum Pemerintah Indonesia gencar melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal pada era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Komnas HAM Provinsi Maluku Benediktus Sarkol mengatakan, Komnas HAM akan fokus pada dugaan perbudakan.

Selain terhadap ABK asing, kemungkinan hal yang sama menimpa ABK asal Indonesia.

Sementara itu, pihak kepoli-

sian belum bisa dikonfirmasi terkait dengan rencana penyelidikan tersebut.

ABK asing

Mukhtar menambahkan, ABK asing yang ingin pulang ke negara asal mereka masih terus bertambah. Saat ini terdapat 347 ABK asing yang diinapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, terdiri dari 281 warga asal Myanmar, 58 warga Kamboja, dan 8 warga Laos.

"Masih ada 958 ABK asing di Benjina, terdiri dari 746 orang asal Thailand, 176 orang asal Myanmar, dan 36 orang asal Kamboja. Selain itu, masih banyak lagi yang bersembunyi di hutan atau di rumah-rumah penduduk setempat," ungkapnya.

Isu soal perbudakan itu sudah lama mencuat dan menjadi berita di beberapa media Thailand. Akan tetapi, kasus itu diduga dilakukan di kapal. Baru belakangan hal itu ditangani secara cepat karena kasus ini berada di darat. Salah satu media asing melaporkan kasus ini sehingga mendapat perhatian dari berbagai kalangan. (FRN)